



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KUNJUNGAN PERDANA MENTERI MALAYSIA KE INDONESIA

Simela Victor Muhamad
Analisis Legislatif Ahli Utama
simela.muhamad@dpr.go.id

Luthfia Husnun Ahira
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
luthfia.ahira@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025. Kunjungan resmi PM Malaysia ini menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan PM Anwar. Pertemuan kedua kepala pemerintahan tidak hanya menampilkan kehangatan diplomasi tetapi juga membahas sejumlah isu strategis yang dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

Untuk isu perbatasan, Presiden Prabowo dan PM Anwar menyepakati langkah strategis untuk mengelola kawasan perbatasan Ambalat melalui skema *joint development*. Kesepakatan ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang progresif, di mana kedua negara memilih untuk mengedepankan kerja sama ekonomi sembari menunggu penyelesaian hukum atas batas wilayah yang masih berlangsung. Dari sisi substansi, kesepakatan ini membuka jalan bagi pembentukan otoritas bersama untuk mengelola cadangan minyak dan gas di wilayah Ambalat, yang selama ini menjadi titik sensitif dalam hubungan bilateral. PM Anwar menyatakan bahwa menunggu penyelesaian hukum bisa memakan waktu hingga dua dekade, sehingga kerja sama ekonomi menjadi solusi yang lebih realistis dan produktif. Selain Ambalat, kedua negara juga membahas isu perbatasan lain seperti Kalimantan-Sabah, dengan semangat saling percaya dan keterbukaan. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dan Malaysia siap memperkuat peran strategisnya di kawasan melalui diplomasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

Dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral dan memperkokoh posisi kawasan di tengah dinamika global yang makin kompleks, Indonesia dan Malaysia telah menyampaikan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kekuatan domestik serta memperkuat peran strategis ASEAN. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai tantangan global, termasuk kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Melalui pernyataan bersama ditegaskan bahwa sinergi antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam konteks bilateral maupun regional, merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya tawar ASEAN dalam forum negosiasi internasional. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga mengedepankan semangat kolektif ASEAN sebagai blok ekonomi dan politik yang solid.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, PM Anwar Ibrahim secara resmi juga meminta dukungan strategis dari Presiden Prabowo untuk mengerahkan kapasitas intelijen dan militer Indonesia dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok yang berkonflik di Myanmar. Permintaan tersebut bukan dalam konteks intervensi militer, melainkan sebagai upaya diplomatik untuk menciptakan ruang dialog dan kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perang saudara. PM Anwar menekankan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam resolusi konflik yang dapat dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan di Myanmar, yang saat ini menjadi salah satu isu prioritas dalam kepemimpinan Malaysia di ASEAN.

Presiden Prabowo merespons secara proaktif dengan memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, untuk segera membahas langkah konkret yang dapat diambil. Pertemuan tersebut mencerminkan kedekatan dan kepercayaan strategis antara kedua negara dalam menghadapi tantangan kawasan. PM Anwar juga menyoroti pentingnya solidaritas ASEAN dalam merespons konflik regional, termasuk ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, serta menegaskan bahwa dukungan timbal balik antara Indonesia dan Malaysia selama masa kepemimpinan ASEAN menjadi fondasi kuat bagi diplomasi kawasan yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim juga menyampaikan sikap tegas dan konsisten dalam mendukung penyelesaian damai atas konflik Palestina-Israel melalui pendekatan *two-state solution*. Kedua kepala pemerintahan menyerukan pentingnya konsensus global yang lebih kuat dalam mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar yang sah dan bermartabat. Sikap ini sejalan dengan amanat Konstitusi Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keselarasan pandangan antara Indonesia dan Malaysia juga memperkuat posisi ASEAN sebagai entitas regional yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen moral dan politik terhadap isu kemanusiaan global, termasuk perjuangan rakyat Palestina.

Atensi DPR

Hubungan internasional yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia harus juga menjadi perhatian DPR, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. DPR, melalui peran diplomasi yang dimilikinya dapat ikut memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara sahabat, termasuk hubungan Indonesia dan Malaysia. DPR, melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Malaysia yang dikelola oleh BKSAP, dapat menjadi bagian yang ikut mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk merespons dan mencari solusi bersama atas isu-isu strategis yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I, DPR dapat ikut mengawal dan memastikan bahwa berbagai kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia, baik yang berkaitan dengan isu bilateral, regional (ASEAN), maupun global terlaksana sesuai harapan bersama. DPR perlu memastikan kebijakan luar negeri yang diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah sejalan dengan kepentingan nasional dan amanat Konstitusi.

Sumber

antaranews.com, 27 Juni 2025;
 Kompas, 28 Juni 2025;
 setneg.go.id, 27 Juni 2025; dan
 thejakartapost.com, 28 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa